

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung dengan tipe strato (*strato volcano*) yang aktif hingga saat ini dan memiliki ketinggian 2.980 meter di atas permukaan laut. Secara geografis terletak pada 7° LS dan 110° BT, secara administratif Gunung Merapi terletak diantara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan empat wilayah kabupaten yaitu Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. (Bappenas & BNPB, 2011)

Gunung Merapi mengalami letusan pada tanggal 26 Oktober 2010 dan berlanjut dengan erupsi lanjutan pada awal November 2010. Menurut Bappenas dan BNPB (2011) menyebutkan bahwa erupsi letusan yang terjadi pada tahun 2010 merupakan letusan terbesar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006. Selain korban jiwa, letusan Gunung Merapi juga berdampak pada sektor kehidupan lainnya seperti sektor ekonomi, sosial, infrastruktur, permukiman dan pertanian. Bahkan, dalam tahap tertentu, bencana letusan Gunung Merapi dapat menyebabkan dampak psikologis atau *post traumatic stress disorder* (PTSD) (Suharyono et al., 2020). Banyaknya korban jiwa dan kerugian material ini disebabkan masih banyak penduduk tinggal di sekitar lereng Gunung Merapi (Ferdiansyah & Muta'ali, 2014). Dengan demikian, diperlukan penanggulangan bencana yang efektif untuk meminimalisir dampak negatif baik pra bencana, saat dan pasca bencana agar masyarakat yang tinggal di daerah tetap merasa aman.

Masyarakat hidup berdampingan dengan alam menyadari bahwa bencana merupakan serangkaian kejadian alam atau kondisi dan situasi yang dapat mengancam kehidupan masyarakat (Sabir, 2016). Sehingga, kesiapsiagaan masyarakat menjadi hal penting dalam menghadapi bencana. Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2007), kesiapsiagaan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan melalui langkah – langkah yang tepat dan efisien. Kesiapsiagaan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi lebih diarahkan pada individu atau masyarakat. Pada hakekatnya masyarakat menghadapi bencana atau kejadian (*coping mechanism*) terbentuk

melalui pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan makna dari setiap kejadian atau masalah yang dihadapi pada lingkungan sekitar (Pramono, 2016). Dalam mengimplementasikan kapasitas masyarakat, diperlukan program mitigasi berbasis masyarakat untuk melakukan penanggulangan bencana.

Mitigasi bencana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (2008) adalah serangkaian upaya pengurangan risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kapasitas kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Dengan demikian, mitigasi dapat didefinisikan sebagai tindakan perencanaan sebelum terjadi bencana dengan tujuan meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan (Kusumasari, 2014).

Terdapat dua macam mitigasi, yaitu fisik dan non fisik. Mitigasi fisik adalah upaya pengurangan risiko melalui pembangunan fisik atau menyediakan fasilitas fisik misalnya pembangunan jalan evakuasi bencana sedangkan mitigasi non fisik adalah pengurangan risiko tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sehingga risiko dapat diminimalkan, misalnya pelatihan SAR (*Search and Rescue*) (Anjasni, 2013). Dalam buku Manajemen Bencana (2012) upaya – upaya mitigasi bencana gunung berapi yaitu; 1) Pemantauan, menggunakan seismograf (alat pendeteksi gempa); 2) Tanggap darurat, evaluasi laporan dan data, pembentukan tim, pengiriman tim tanggap darurat ke lokasi, pengecekan secara terpadu; 3) Pemetaan, Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung berapi dapat menjelaskan jenis dan sifat bahaya gunung berapi, daerah rawan bencana, arahan penyelamatan diri, lokasi evakuasi, dan posko penanggulangan bencana; 4) Penyelidikan, dengan menggunakan metode Geologi, Geofisika, dan Geokimia; 5) Sosialisasi, melakukan sosialisasi khususnya kepada masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi.

Meskipun kawasan Gunung Merapi merupakan kawasan dengan potensi bahaya yang tinggi, masyarakat secara aktif memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian (Bachri et al., 2015). Mengandalkan sumber daya alam untuk mempraktekkan pertanian merupakan hal yang lumrah. Selain risiko dan bahaya dari gunung berapi, letusan Gunung Merapi membawa dampak baik bagi

masyarakat sekitar yaitu tanah yang subur. Contoh pengelolaan pada lahan dengan kegiatan usahatani yaitu menggunakan teknik terasering, hortikultura bersistem agroforestri (Rahayu et al., 2014). Dengan komoditas tanaman sayuran seperti cabai rawit, kembang kol, wortel, kubis dan terong (BPS Kabupaten Boyolali, 2022). Hal menariknya adalah dengan kondisi ini masyarakat petani Gunung Merapi memiliki konsekuensi bekerja secara kolektif melalui pertanian masyarakat (Partelow, 2021). Mereka membentuk komunitas – komunitas yang memiliki dampak baik pada kehidupan petani di kawasan rawan bencana gunung berapi dan bertujuan untuk membentuk sikap ketahanan petani.

Community resilience atau ketahanan komunitas adalah kemampuan daya tahan komunitas untuk mempersiapkan, merespons dan pulih dari ancaman bencana (Wisner & Kelman, 2015). Pengertian *resilience* umumnya mencerminkan bagaimana komunitas merespons beberapa peristiwa buruk seperti bencana alam. Definisi yang tepat dalam hal peningkatan kemampuan untuk pulih setelah bencana secara eksplisit atau implisit mengandung lima konsep inti, yaitu atribut, berkelanjutan, adaptasi, lintasan dan keterbandingan (Carri.A.;, 2013). Sedangkan komunitas dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terlibat dalam interaksi sosial berkelanjutan dengan wilayah dan konsekuensi risiko yang sama (Kirmayer et al., 2009). Ketahanan masyarakat memiliki beberapa ciri yaitu berpengetahuan luas, komunitas yang tangguh mempunyai kemampuan untuk menilai, memperkirakan, mengelola, dan memantau setiap risiko yang mungkin terjadi dalam komunitas sehingga dapat terorganisir. Pada pengertian *community resilience* tidak lepas dari aspek pendukung dalam membentuk ketahanan komunitas yaitu berupa ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan (Runtunuwu et al., 2018).

Aspek – aspek tersebut dapat digunakan sebagai tingkat tolak ukur kemampuan komunitas untuk mengambil tindakan kolektif yang mengarah dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam memperbaiki dampak dari permasalahan. Peningkatan terhadap *community resilience* setelah terjadi erupsi Gunung Merapi perlu dilakukan, hal ini didasari bencana erupsi mempunyai periode ulang berkisaran antara 2 – 5 tahun sekali selama Gunung Merapi masih

dalam status aktif, sehingga ketika bencana alam erupsi Gunung Merapi kembali terjadi, masyarakat akan lebih siap terhadap dampak yang ditimbulkan. (Istikasari & Panjaitan, 2020)

Salah satu daerah yang merasakan dampak letusan Gunung Merapi adalah Desa Tlogolele. Desa ini terletak di Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah dengan bagian administrasi menjadi 4 Dusun, 8 Dukuh, 5 RW dan 19 RT. Desa Tlogolele berada dekat dari puncak Gunung Merapi dan berjarak 4 km dari puncak sehingga merupakan salah satu daerah rawan bencana Gunung Merapi yang berada pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yang berarti memiliki tingkat risiko terhadap awan panas, abu vulkanik, aliran lahar, gas beracun serta guguran batu pijar sangat tinggi (Masrukin et al., 2014). Hal ini mempengaruhi perilaku masyarakat Desa Tlogolele yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian mengenai *community resilience* telah banyak dilakukan di Indonesia, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Akbar (2017) mengenai model konseptual kerangka *community resilience* pada masyarakat pasca bencana di Yogyakarta dan dalam penelitian Suharyono, Nurmala dan Saharuddin (2020) tentang adaptasi komunitas yang akan berdampak positif bagi pengembangan resiliensi komunitas dalam menghadapi perubahan akibat bencana alam. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada *community resilience* petani yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat petani dapat bertahan secara kolektif terhadap bencana Gunung Merapi dan bagaimana strategi *Community Resilience* Petani dalam menghadapi bencana Gunung Merapi di Desa Tlogolele, Kabupaten Boyolali.

B. Tujuan

1. Mengetahui bagaimana strategi masyarakat petani terhadap bencana Gunung Merapi di Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali
2. Menganalisis ketahanan masyarakat petani terhadap bencana Gunung Merapi di Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali

C. Kegunaan

1. Manfaat teoritis, dapat memperluas pengetahuan bagi peneliti, akademis, instansi pemerintah dan masyarakat terkait strategi *Community Resilience* Petani dalam menghadapi bencana Gunung Merapi.
2. Manfaat praktis, memberikan informasi dan menambah referensi hasil penelitian yang dikembangkan sebagai bahan rujukan untuk penelitian terkait.